



LAPORAN PENYELENGGARAAN

FORUM NASIONAL UNTUK HUTAN DAN MASYARAKAT

PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT STATUS KINI DAN MASA DEPAN

Jakarta, 15 – 16 April 2014



DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
PENDAHULUAN	1
MENUJU PENGELOLAAN HUTAN YANG LEBIH BERKEADILAN	1
Sejarah Devolusi Pengelolaan Hutan	1
Kerjasama Lintas Sektoral untuk Membuka Jalan Pengelolaan Hutan yang Berkeadilan	2
RENCANA AKSI BERSAMA	3
Hasil Diskusi Kelompok Masyarakat	3
Hasil Diskusi Kelompok LSM Lokal dan Sektor Swasta	4
Hasil Diskusi Kelompok Pemerintah Pusat	6
Hasil Diskusi Kelompok Pemerintah Daerah	7
Hasil Diskusi Kelompok Akademisi dan Organisasi Internasional	8
Seruan Peserta Forum	10
KESIMPULAN	11

DAFTAR SINGKATAN

AD	Anggaran Dasar
ART	Anggaran Rumah Tangga
Baplan	Badan Planologi Kehutanan
BLU	Badan Layanan Umum
BP DAS PS	Badan Pengembangan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial
BUMDES	Badan Usaha Milik Desa
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CIFOR	Center for International Forestry Research
Desperindakop	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Dishut	Dinas Kehutanan
Ditjen OTDA	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
FKKM	Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat
HD	Hutan Desa
HKm	Hutan Kemasyarakatan
HPH	Hak Pengelolaan Hutan
HR	Hutan Rakyat
HTR	Hutan Tanaman Rakyat
HTI	Hutan Tanaman Industri
KPHBM	Kesatuan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MOU	Memorandum of Understanding
NGO	Non Government Organization
PAD	Pemerintah Provinsi
Pemprov	Pendapatan Asli Daerah
Pemkab	Pemerintah Kabupaten
PHBM	Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
	Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (di Perum Perhutani)
PMDHT	Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Terpadu
Pokmas	Kelompok Masyarakat
PP	Peraturan Pemerintah
RECOFTC	Regional Community Forestry Training Center
RKHD	Rencana Kerja Hutan Desa
RKN	Rencana Kehutanan Nasional
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RTHD	Rencana Tahunan Hutan Desa
RTRWK	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
SIK	Sistem Inovasi Kehutanan
SKB	Surat Keputusan Bersama
UPT	Unit Pelaksanaan Teknis
Tomas	Tokoh Masyarakat
WGP	Working Group Pemberdaya

UCAPAN TERIMA KASIH

Forum Nasional Untuk Hutan dan Masyarakat yang pertama telah diselenggarakan pada tanggal 15-16 April 2014 di Jakarta dihadiri oleh 82 peserta dari kalangan wakil masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, LSM, lembaga bisnis, lembaga penelitian dan akademisi, serta 20 orang jurnalis yang berpartisipasi dalam pers rilis. Forum Nasional ini diselenggarakan oleh RECOFTC—The Center for People and Forests Country Program Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, Perum Perhutani, Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), Kemitraan (Partnership for Governance Reform) dan Yayasan Perspektif Baru (YPB).

RECOFTC mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah bekerja keras untuk suksesnya penyelenggaraan forum ini. Secara khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Hadi Daryanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan yang telah berkenan hadir dan membuka acara; putra-putri yang tergabung dalam Masquerade Cinta Alam Negriku yang telah memeriahkan acara pembukaan forum; Ilya Moeliono yang telah mendukung fasilitasi acara forum; para narasumber: Rabbani, Bartholomeus dan Haji Nuri (para wakil kelompok masyarakat), Wiratno (Direktur Bina Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan), Teguh Purwanto (Kepala Biro Kelola Sosial Perum Perhutani), Myrna Safitri (Direktur Epistema Institute), Totok Dwi Diantoro (ARupa), Ahmad Maryudi (Universitas Gadjah Mada), Andjar Rochani (Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian), Supratman Suyuti (Universitas Hasanuddin); Melda Sitompul dan semua anggota tim kerja Yayasan Perspektif Baru yang sudah menyelenggarakan dengan sangat baik acara Siaran Pers untuk forum ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada tim Sekretariat: Andri Santosa (FKKM), Hasbi Berliani (Kemitraan), Yosef Arihadi, Yuyun Yuningsih, Lissa, dan Titik atas koordinasi persiapan acara dan logistik penyelenggaraan forum ini serta tim RECOFTC kantor regional: James Bampton, Detty Saluling dan Ahmad Dhiaulhaq yang tak henti-hentinya mendorong bergulirnya persiapan dan pelaksanaan acara. Terakhir dan yang terpenting, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada para peserta Forum Nasional yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, yang telah aktif berbagi pengetahuan, pengalaman dan wawasannya dari awal hingga akhir acara.

Laporan ini dipersiapkan oleh Yosef Arihadi, Ahmad Dhiaulhaq dan Detty Saluling



FLIPCHART CONTENT:

NO	NAME	STATUS
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...
31	...	...
32	...	...
33	...	...
34	...	...
35	...	...
36	...	...
37	...	...
38	...	...
39	...	...
40	...	...
41	...	...
42	...	...
43	...	...
44	...	...
45	...	...
46	...	...
47	...	...
48	...	...
49	...	...
50	...	...

PENDAHULUAN

Forum Nasional untuk Hutan dan Masyarakat yang diselenggarakan di Indonesia adalah salah satu dari rangkaian forum yang diadakan di beberapa negara perhatian RECOFTC yaitu Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand dan Viet Nam. Penyelenggaraan forum-forum nasional tersebut merupakan tindak lanjut dari Forum Regional yang telah terselenggara di Bangkok pada 19-20 November 2013 yang dihadiri oleh perwakilan peserta dari kurang lebih 15 negara.

Di dalam Forum Regional tersebut, delegasi Indonesia merefleksikan bahwa berbagai bentuk Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) telah dikembangkan di Indonesia, dan program tersebut telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional). Target untuk memperluas wilayah PHBM telah ditetapkan Kementerian Kehutanan dan saat ini berfokus pada perlunya meningkatkan pengembangan produk-produk kehutanan yang semula hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan subsisten menuju ke arah penggunaan yang bersifat komersial dan peningkatan manfaat ekonomi riil bagi anggota masyarakat yang mengelolanya.

Dari dua setengah juta hektar PHBM yang telah ditargetkan oleh pemerintah, sampai saat ini baru 360.000 hektar yang telah dicapai. Hak-hak masyarakat adat atas hutan di Indonesia telah diakui oleh pemerintah namun dalam pelaksanaannya belum ada peraturan yang jelas. Dalam memperluas wilayah PHBM di tingkat lanskap, diperlukan pendekatan yang tidak terfragmentasi dengan cara meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Perubahan penting yang perlu didorong di masa mendatang adalah bagaimana perluasan PHBM dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang di tingkat daerah.

Forum Nasional untuk Hutan dan Masyarakat yang pertama di Indonesia ini bertujuan untuk:

- menilai status terkini perkembangan PHBM di tanah air;
- mengidentifikasi tantangan dan peluang; serta
- menguatkan komitmen bersama dan menyusun rencana aksi nasional bagi pengembangan PHBM

Komitmen utama yang telah dibuat oleh anggota delegasi Indonesia pada Forum Regional untuk tiga tahun ke depan adalah:

- Dua juta hektar hutan adat diakui oleh pemerintah
- Lima juta total kawasan hutan dikelola oleh masyarakat
- Komersialisasi lima produk unggulan dari Kehutanan Masyarakat
- Tiga puluh persen dari kelompok pengguna hutan mencapai tahap maju.

Untuk mencapai komitmen tersebut di atas, beberapa strategi yang akan ditempuh mencakup:

- Mengikutsertakan program perluasan Kehutanan Masyarakat ke dalam rencana pembangunan dan perencanaan tata ruang pemerintah daerah jangka menengah
- Meningkatkan penganggaran dan perencanaan untuk pengembangan Kehutanan Masyarakat
- Meninjau dan memperbaiki peraturan untuk perizinan kawasan Kehutanan Masyarakat
- Memfokuskan keterlibatan sektor swasta untuk pengembangan usaha Kehutanan Masyarakat

Penyelenggaraan Forum Nasional Indonesia mengadopsi format yang digunakan dalam penyelenggaraan Forum Regional agar tercipta alur yang sinergis.

Informasi lebih lanjut dan laporan-laporan Forum Nasional lainnya dapat diakses pada website RECOFTC di <http://www.recoftc.org/site/resources/The-Third-Regional-Forum-for-People-and-Forests.php>

MENUJU PENGELOLAAN HUTAN YANG LEBIH BERKEADILAN

Forum Nasional Indonesia mengangkat beberapa pesan penting untuk pengembangan PHBM di Indonesia. Pesan-pesan tersebut disampaikan dengan jelas dan lugas oleh para narasumber forum dalam presentasi dan diskusi bersama para peserta. Saat menyampaikan kata pengantar dalam pembukaan acara, Hadi Daryanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, menekankan bahwa "sudah saatnya pemerintah memberikan akses legal yang lebih luas kepada masyarakat setempat atas sumberdaya hutan, lembaga keuangan dan pasar. Prinsip tersebut harus menjadi bagian prioritas kebijakan Kementerian Kehutanan sekarang dan untuk seterusnya."

Sejarah Devolusi Pengelolaan Hutan

Di hari pertama forum, Rabhani, pengelola Hutan Desa dari Bantaeng, Bartholomeus dari Sikka dan Haji Nuri dari Bandung Utara dengan lancar bertutur tentang berbagai upaya mereka dalam mengelola hutan melalui Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan pada areal hutan negara dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di areal hutan Perhutani. Mereka adalah sebagian kecil masyarakat yang telah menikmati hasil kerja mengelola lahan hutan negara.

Berbagai bentuk program tersebut membawa beragam cerita keberhasilan, tidak hanya memberi manfaat bagi para pengelolanya tapi juga terbukti berkontribusi pada kelestarian hutan. Inisiatif dan inovasi masyarakat dalam mengusahakan agroforestry di kawasan hutan telah menghasilkan berbagai komoditas penting seperti kopi, kemiri, markisa, madu, coklat, ternak hingga air minum dan wana wisata. Keberagaman bentuk pengusahaan produk-produk tersebut menentukan tingkat pendapatan dan kesejahteraan para pengelolanya. Para tokoh petani hutan tersebut sangat merasakan adanya kebutuhan untuk saling berbagi pengalaman dan membangun jaringan kerjasama di antara para pelaku PHBM.

“Dalam menjalankan devolusi pengelolaan hutan, Kementerian Kehutanan berbagi kewenangan dan peran dengan pemerintah daerah propinsi, dan kabupaten. HKm dan HD ini bukan proyek tetapi kebijakan pemerintah untuk memberi peluang kepada masyarakat meningkatkan kesejahteraannya.” (Wiratno, Direktur BPS, Kementerian Kehutanan)

Apa yang diungkapkan oleh para tokoh petani hutan tersebut merupakan buah sejarah proses devolusi pengelolaan hutan negeri ini. Sejak 1990an Indonesia telah mengujicoba program HPH Bina Desa Hutan yang diwajibkan kepada para pemegang Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) hingga pengembangan program Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Sudah ada banyak pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman program-program tersebut. Indonesia menyaksikan suksesnya penyelenggaraan Reformasi Pertanahan (Land Reform) di Jepang, Taiwan dan Korea yang telah mengubah status petani sebagai penyewa menjadi pemilik, dan para pemilik berhasil menginvestasi ganti rugi tanahnya ke industri. Di India, soft land reform juga telah mengubah institusi makelar dan memperkuat posisi penyewa. Perubahan status ini berdampak positif secara politik dan ekonomi. Dari berbagai contoh tersebut dapat ditarik pembelajaran bahwa kemiskinan terjadi karena masyarakat tidak mempunyai akses legal terhadap sumberdaya.

Kementerian Kehutanan mendorong pengembangan program PHBM melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan kemitraan dengan Hutan Rakyat (HR). HKm dan HD dapat dikembangkan pada hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak dan diperuntukkan bagi masyarakat yang punya ketergantungan dengan hutan. Ijin diberikan kepada kelompok atau lembaga desa selama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Sementara itu pengembangan kemitraan Hutan Rakyat dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan pengembangan industri kayu yang berubah orientasi dari memanfaatkan kayu hutan alam ke Hutan Rakyat.

Pemerintah pusat menetapkan aturan pelaksanaan, verifikasi atas usulan HKm dan HD dari pemerintah daerah, fasilitasi pengembangan usaha serta pengawasan dan pengendalian. Pemerintah daerah melaksanakan penyiapan kelompok atau lembaga desa, menyampaikan usulan kepada Menteri, menetapkan ijin, membina kelompok/ lembaga desa dan fasilitasi pengembangan usaha. Dalam seluruh proses persiapan dan pelaksanaan ini, pemerintah bekerjasama dengan LSM yang memfasilitasi proses sepanjang alur kegiatan.

“Sebelumnya, masyarakat selalu merambah hutan untuk bisa makan dan bertahan hidup. Perhutani selalu mengusir kami. Saat ada program PHBM untuk boleh mengakses hutan, kami sangat antusias. Sekarang sudah terasa manfaatnya, kelompok kami dapat mengeksplor kopi sampai Maroko. Hal ini mengurangi angka pengangguran dan putus sekolah.” (Haji Nuri, Wakil Kelompok Masyarakat dari Bandung Utara)

Sementara itu, Perum Perhutani sebagai BUMN pengelola hutan di Jawa dan Madura juga penting untuk dibahas dalam perkembangan PHBM. Teguh Purwanto mewakili Perum Perhutani menyatakan bahwa program PHBM di wilayah hutan Perhutani merupakan perkembangan evolusioner pengelolaan hutan dan pelibatan masyarakat setempat.

Program ini dimulai sejak tahun 1960an dengan tumpangsari, pengembangan prosperity approach di dalam kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial tahun 1984 dan di luar kawasan hutan melalui PMDHT (Pembangunan Masyarakat Desa Hutan Terpadu) pada 1994 hingga penerapan Pengelolaan Hutan Bersama/Berbasis Masyarakat (PHBM) dari tahun 2001 hingga kini.

Pengembangan peran dan partisipasi masyarakat, peningkatan kesejahteraan serta keterlibatan pemerintah daerah dalam kelembagaan program terus ditingkatkan. Harapannya adalah agar institusi masyarakat pengelola hutan terus tumbuh menjadi lembaga usaha yang mampu meningkatkan ekonomi sekaligus melestarikan sumberdaya hutan. Menurut Teguh Purwanto, baru sekitar 23 persen kelompok masyarakat yang telah berhasil mengembangkan program PHBM seperti penuturan cerita sukses Haji Nuri dari Bandung.

“Perlu ada rancangan distribusi peruntukan hutan antara rakyat dan korporasi yang lebih menjamin keadilan. Untuk mempercepat perluasan HKM dan HD juga diperlukan penyederhanaan prosedur perijinan dan jaminan efektifitas dekonsentrasi HKM dan HD hingga mencapai target” (Myrna Safitri, Direktur Epistema Institute).

Mengkritisi perkembangan PHBM di Perum Perhutani ini, Totok Dwi Diantoro dari ARupa menyatakan bahwa kepentingan institusi kehutanan dan masyarakat perlu terus diupayakan keseimbangannya. Kepentingan untuk mengamankan hutan dan pendapatan dari hasil hutan dalam program PHBM menjadi ciri lembaga usaha BUMN seperti Perhutani. Hal ini tercermin dari kebijakan dan praktek-praktek manajemen hutan yang masih sangat didominasi oleh aparat Perum Perhutani. Di tingkat pengembangan kebijakan PHBM, masih sedikit ruang bagi keterlibatan masyarakat dan di sisi lain aspek pembagian manfaat dari PHBM belum mencerminkan keadilan. Di sisi kebijakan bagi hasil pada akhir daur, masyarakat lebih banyak menyumbangkan tenaga dan kontribusi dalam proses produksi dan perlindungan hutan daripada manfaat dari PHBM.

Kerjasama Lintas Sektoral Untuk Membuka Jalan Pengelolaan Hutan Yang Berkeadilan

Keadilan distribusi pengelolaan hutan dapat dicermati dari dokumen Rencana Kehutanan Nasional (RKN) 2011–2030 dari Kementerian Kehutanan. Dari luas hutan efektif sebesar 112,34 juta hektar 43,62 juta hektar (39 persen) dialokasikan untuk ijin pengelolaan bagi korporasi, sementara kawasan hutan yang diperuntukkan bagi rakyat hanya sebesar 5,57 juta hektar (5 persen) dari kawasan hutan efektif. Sementara itu dari jumlah total 88.361 desa di Indonesia, 33.957 (36,17 persen) berada di dalam, di tepi atau di sekitar kawasan hutan. Ketimpangan distribusi pengelolaan hutan antara masyarakat dan kelompok usaha sangat jelas terlihat.

Supratman Suyuti, akademisi dari UNHAS menyampaikan bahwa pengelolaan dan pengelolaan hutan harus mengintegrasikan tiga sub-sistem: hutan itu sendiri, sistem sosial masyarakat di sekitar hutan, dan industri dan pengguna hasil hutan. Pengelola PHBM memproduksi berbagai komoditas kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan jasa lingkungan namun hanya komoditas kehutanan saja yang diakui oleh institusi kehutanan. Hal ini menyebabkan komoditas kehutanan tidak bernilai ekonomi strategis.

Unit-unit usaha dan komoditas hasil PHBM perlu diintegrasikan ke dalam struktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (KPHBM) agar terbangun aglomerasi usaha kehutanan dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), industri dan pengguna hutan lainnya. Total produksi akan meningkat karena usaha dan produk-produk yang dihasilkan bergabung dengan unit-unit usaha. Selain produksi yang meningkat, efisiensi biaya pemasaran juga dapat tercipta karena pemasaran yang dilakukan bersama-sama. Demikian juga dengan biaya pelayanan kepada masyarakat yang akan menjadi lebih efisien karena pelayanan publik kehutanan dilakukan di desa. PHBM adalah program pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan aksi bersama dari berbagai pihak.

Andjar Rochani, Direktur Direktorat Pengelolaan Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian, mengungkapkan bahwa di samping penguasaan lahan pertanian rata-rata nasional yang sudah semakin sempit, tingkat konversi lahan pertanian menjadi penggunaan lain secara nasional mencapai 110.000 hektar per tahun. Berkurangnya lahan pertanian ini tentunya membutuhkan alternatif bagi penyediaan pangan nasional melalui tambahan lahan baru dan/atau intensifikasi lahan yang sama.

Salah satu program Kementerian Pertanian adalah pengembangan agrobisnis/agroindustri pedesaan berbasis kelompok dengan prinsip tanpa limbah (zero waste). Program sejenis ini membuka peluang integrasi dengan program PHBM. Kerja sama antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian serta kementerian lainnya diperlukan bukan hanya untuk mensinergikan kepentingan kementerian tetapi utamanya adalah untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat yang menjadi pelaku kunci program pembangunan kehutanan.

RENCANA AKSI BERSAMA

Setelah mendapatkan masukan dari presentasi para narasumber forum, para peserta mendiskusikan tantangan dan peluang pengembangan PHBM di Indonesia. Di dalam kelompok-kelompok ini disusun rencana aksi bersama untuk tiga tahun ke depan (2014-2016). Para peserta Forum Nasional dibagi menjadi 5 kelompok diskusi yaitu: Kelompok Masyarakat, Kelompok LSM lokal dan sektor swasta, Kelompok Pemerintah Pusat, Kelompok Pemerintah Daerah dan Kelompok Akademisi dan Organisasi Internasional.

Apa yang dirasakan masyarakat sehari-hari dalam mengelola penghidupan dan lahan hutannya adalah persoalan riil yang membutuhkan jalan keluar segera seperti kemiskinan dan rasa ketidakberdayaan untuk meningkatkan taraf hidup. Di lain pihak belum banyak keterlibatan pemerintah daerah maupun sektor swasta dalam membangun kerjasama dengan masyarakat untuk berusaha bersama.

Berikut ini adalah hasil refleksi dan diskusi anggota kelompok yang berkaitan dengan tantangan, peluang serta rencana aksi:

Hasil Diskusi Kelompok Masyarakat

Tantangan
• Pemasaran produk hasil hutan masih didominasi oleh para tengkulak • Tidak ada pengawasan dan penilaian dari pemerintah daerah setelah pemberian ijin usaha • Petani Rehabilitasi belum mendapatkan ijin resmi dari pihak Taman Nasional • Kemiskinan dan kapasitas sumberdaya manusia masih rendah • Akses permodalan kurang • Sebagian besar lahan masih dikuasai pemerintah dan perusahaan • Kesenambungan pendampingan dalam mengelola hutan setelah perijinan masih kurang
Peluang
• Masyarakat masih tetap dapat mengelola hutan lindung • Tambahan lahan di hutan untuk pemenuhan hidup dan mengurangi pengangguran pedesaan • Pemberian ijin pengelolaan memberi peluang untuk mengolah komoditi dan mengembangkan bisnis • Pemasaran bersama melalui koperasi dirasakan sebagai kebutuhan untuk pemasaran bersama menghadapi tengkulak • Produk kerajinan (misalnya anyaman rotan, kopi, mete, dll) hasil karya masyarakat berpotensi dipasarkan. • Hutan dapat dikembangkan sebagai obyek wisata • Saling belajar antar kelompok pengelola hutan

Penguatan kapasitas masyarakat dalam hal kelembagaan kelompok dan usaha serta membangun jaringan pemasaran maupun jaringan yang lebih luas untuk menggalang kebersamaan dalam skala provinsi dan nasional. Kebersamaan dan jaringan yang luas itu diperlukan sebagai alat untuk menyuarakan kepentingan mereka.

Rencana Aksi Masyarakat					
Gagasan Kegiatan	Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan	Waktu			Lembaga Pelaksana
		2014	2015	2016	
Pelatihan Penguatan Kelembagaan	Pelatihan manajemen kelompok dan penyusunan AD/ART	✓	✓		Masyarakat, LSM Pendamping
	Pelatihan budidaya dan pengolahan hasil hutan kayu dan non-kayu	✓	✓		Masyarakat, LSM, Kemenhut dan Dinas Kehutanan (Dishut)
	Studi banding pengolahan hasil hutan kayu dan non-kayu	✓	✓	✓	Masyarakat, LSM, Kemenhut dan Dishut
Membangun jaringan pemasaran hasil hutan kayu dan non kayu	Membangun jaringan pemasaran hasil hutan (kayu dan non-kayu) melalui koperasi	✓	✓	✓	Masyarakat, LSM, Dishut, Sektor swasta, Desperindakop
	Membentuk jaringan nasional dengan pertemuan rutin di tingkat provinsi	✓	✓	✓	Masyarakat, LSM, FKMM dan RECOFTC
Monitoring dan evaluasi	Mendorong pemberi ijin untuk membuat panduan evaluasi HKm, HD dan HTR.	✓	✓	✓	Masyarakat, LSM, Dishut dan Kemenhut

Hasil Diskusi Kelompok LSM Lokal dan Sektor Swasta

Sebagai kelompok yang paling intensif terlibat dalam seluruh rangkaian proses PHBM, kelompok NGO membuka banyak ruang diskusi bagi pengembangan PHBM. Kompleksitas pembahasan tersebut menyangkut kebijakan nasional yang dikeluarkan Kemenhut berkaitan dengan tata kelola lahan hutan, birokrasi perijinan hak pengelolaan kawasan, pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan kayu, penganggaran program, pendampingan, orientasi pengembangan PHBM bagi pemerintah daerah.

Sejumlah rekomendasi pada fase sebelum perijinan hak kelola dan pasca perijinan juga dirumuskan seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tantangan
• Status legal atas lahan yang dikelola masyarakat belum mantap • Proses perijinan terlalu panjang (melalui 27 meja) • Proses fasilitasi oleh pemerintah pasca perijinan kurang terkoordinasi • Kelompok masyarakat kekurangan modal untuk mengelola hutan yang sudah berijin • Kurangnya prioritas dari Pemerintah daerah dan UPT Kementrian untuk membantu HKm, HD • Perlu penyederhanaan Perdirjen No.11 tentang Rencana Kerja • Ijin pemanfaatan kayu untuk HKm, HD di hutan produksi hanya berlaku 1 tahun • Pemasaran produk tidak sesuai harapan dan pemilihan jenis kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan orientasi pasar • Tidak ada kebijakan hulu hilir yang terintegrasi dimana HKm, HD tidak terintegrasi dalam RPJM Desa dan Daerah • Kapasitas aparat pemerintah dalam fasilitasi dan alokasi anggaran masih rendah • Kawasan yang diusulkan untuk HKm, HD belum ada tata batasnya
Peluang
• Sudah ada Peraturan Menteri Kehutanan terkait tentang Dekonsentrasi • Revisi PP No 6/2007 tentang ijin Pemanfaatan Kayu di HKM dan HD • Pengurusan Ijin untuk HKM dan HD di hutan produksi akan diberikan oleh BUK • Produk beragam dan melimpah (memerlukan kebijakan dan mekanisme pengembangan yang diatur dengan baik); ada trend pasar internasional yang pro masyarakat dan pro lingkungan • Sudah ada SKB/MOU antar Dirjen Kemenhut dengan Kemendagri • Sudah ada roadmap pemberdayaan masyarakat yang disusun WGP

Rekomendasi

Rekomendasi tentang perijinan

- BPDAS-PS harus mengalokasikan HKm dan HD dengan fasilitator dan pendamping seperti di HR
- Revisi mekanisme perijinan dengan mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat (pencadangan areal HKm, HD ke dalam RTRW) dengan mengalokasikan areal untuk HKm, HD dan HTR lebih luas
- SK Menteri (PAK) Sosialisasi Bupati ke Kades Sosialisasi Kades ke desa SK Kades Penetapan Kelompok Pengelola Penyusunan RKHD, RTHD, pembentukan BUMDES, pemanfaatan IUPHHK
- HKm dan HD disamakan dengan HTR yang langsung ditetapkan Menteri
- Pemerintah Pusat disarankan mengambil alih kewenangan (sesuai UU terkait) jika Gubernur dan Bupati tidak mengeluarkan ijin
- Kemenhut membuat roadmap tentang HKm, HD dan HTR
- Pendekatan komoditi dikedepankan untuk meningkatkan PAD daripada akses lahan
- Identifikasi ulang HKm, HD, HTR berdasarkan skema dan fungsi hutan dengan output peta indikatif dan harus disosialisasikan ke desa-desa
- Pendampingan perlu persiapan dengan rekrutmen dan pengembangan kapasitas (pelatihan, review hasil pelatihan dan proses saling belajar)
- Integrasi PHBM ke dalam Rencana Desa (RJPMDes), rencana Kecamatan, RTRW, Rencana Kabupaten dan APBD
- Mendorong Pokja PHBM yang aktif di tingkat kabupaten (eksekutif, legislatif, NGO, perusahaan/BUMN) untuk menyusun program kemitraan dengan PHBM

Rekomendasi Pasca Perijinan

- Rehabilitasi hutan serta pemilihan jenis tanaman/komoditi
- Pengolahan produk hasil hutan
- Pengembangan akses Pemasaran dan akses permodalan
- Dukungan teknologi termasuk mitra lembaga dana
- Pengembangan kapasitas: sumber daya manusia (SDM), silvikultur/teknik budidaya, manajerial/keuangan, rencana bisnis, kewirausahaan
- Kampanye agar kabupaten tertarik dengan PHBM

Rencana aksi dalam rentang waktu tiga tahun yang dirumuskan mencakup advokasi untuk perbaikan kebijakan, integrasi sektor kehutanan di dalam pembangunan daerah, perluasan hak kelola bagi masyarakat serta agenda pengembangan kapasitas terutama pada level pendamping.

Rencana Aksi LSM Lokal dan Sektor Swasta

Gagasan Kegiatan	Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan	Waktu			Lembaga Pelaksana
		2014	2015	2016	
Advokasi Revisi PP, Permenhut tentang HD, HKm dan Kawasan Konservasi	Mengumpulkan data dan informasi Studi Kebijakan FGD, Lokakarya dan seminar	✓	✓		Masyarakat, NGO, WGP dan akademisi
Mengintegrasikan PHBM ke dalam RJPMDes, RPJMD dan RTRW/K	Membentuk Pokja PHBM tingkat kabupaten dan propinsi Melakukan pertemuan-pertemuan	✓	✓		Masyarakat, NGO, Kemenhut dan Dishut
Menyediakan pendamping dan fasilitator PHBM	Melakukan dialog dengan Kemenhut dan Dishut Kabupaten tentang kebutuhan pendamping	✓			BPDAS-PS, Bakorlu, Dishut Kabupaten
Memperluas ruang kelola PHBM	Identifikasi dan inventarisasi potensi Sosialisasi potensi areal PHBM	✓			BPDAS – PS, Dishut Propinsi dan Kabupaten
Peningkatan kapasitas pendamping dan masyarakat	Pelatihan, Kunjungan Belajar, Magang	✓	✓		Kemenhut, NGO, Pemda

Hasil Diskusi Kelompok Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat membahas banyak hal yang terkait dengan kebijakan yang tidak implementatif, kapasitas pemerintah daerah yang belum memadai, penganggaran dan orientasi pembangunan yang masih tergantung pada pendanaan proyek.

Tantangan dan Cara Mengatasi Tantangan	
• Kompetensi SDM dalam kelola sosial masih kurang • Ego sektoral (external maupun internal) • Kebijakan kurang implementatif dan berkesinambungan • Kepastian batas kawasan yang belum jelas • Birokrasi perijinan yang panjang • Kurangnya anggaran pembangunan • Dukungan para pihak lemah • Tumpang tindih penggunaan kawasan • Lemahnya monitoring dan evaluasi • Masih berorientasi proyek.	• Rekrutmen SDM, Diklat, magang dan studi banding • Menyusun perencanaan bersama program dan RTRW • Kebijakan disusun secara lokal, spesifik dan sistemik (kontinyu). • Kemauan politik para pihak untuk menyelesaikan tata batas kawasan secara partisipatif • Mengoptimalkan capaian kinerja melalui perijinan satu atap. • Kerjasama multipihak. • Mendorong terbitnya SKB dan SIK.
Peluang	
• SDM yang berlimpah • Potensi kawasan hutan besar dan teknologinya sederhana • Hutan menghasilkan multi produk • Ada alokasi anggaran di tiap sektor dan dukungan dana dari donor (CSR, Luar Negeri)	• Membangun SDM berkualitas dan distribusi tenaga trampil dan kompeten • Masyarakat memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya alam (SDA) • Sistem cost and benefit sharing yang adil. • Pengembangan teknologi tepat guna • Pengembangan produktifitas dan kualitas hasil hutan kayu dan non kayu • Mengintegrasikan sumber-sumber anggaran dari pemerintah
Rekomendasi	
Fase sebelum perijinan • Pendampingan pemohon • Sosialisasi stakeholder di daerah • Monitoring dan evaluasi terhadap proses pengajuan ijin, alat pengukur kepuasan pemohon • MOU dengan Kemendagri/Pemda	
Fase pasca perijinan • Pendampingan • Penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah	

Rencana aksi yang dirumuskan oleh kelompok Pemerintah Pusat mengarah pada satu payung kerjasama lintas sektoral dengan Kementerian Dalam Negeri yang dalam hal kewenangan mengurus masyarakat desa.

Rencana Aksi Pemerintah Pusat					
Tujuan Umum: integrasi PHBM sebagai program nasional					
Tujuan khusus: mempercepat Pemda mendukung PHBM					
Gagasan Kegiatan	Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan	Waktu			Lembaga Pelaksana
		2014	2015	2016	
MOU Kemenhut dengan Kemendagri	Identifikasi masalah lapang PHBM	✓			Ditjen BPDAS PS
	Konsultasi dengan para pihak (Kemendagri)	✓			Ditjen BP DAS PS Ditjen OTDA
	Penyusunan naskah MOU	✓			Ditjen BPDAS PS Ditjen OTDA
	Penandatanganan MOU		✓		Menhut dan Mendagri
	Sosialisasi MOU program PHBM			✓	Kemenhut dan Kemendagri

Hasil Diskusi Kelompok Pemerintah Daerah

Kelompok pemerintah daerah yang secara fisik dan social berada lebih dekat dengan masyarakat menyoroti kualitas SDM masyarakat; kelembagaan PHBM, kebijakan dan birokrasi di provinsi dan kabupaten. Sejumlah peluang diidentifikasi untuk dimanfaatkan dalam menjawab tantangan.

Tantangan dan Cara Mengatasi Tantangan	
- Kualitas SDM Masyarakat dan pemahaman petugas yang masih rendah - Kelembagaan yang belum mantap - Dianggap pesaing bagi kelembagaan desa - Rendahnya komitmen eksekutif dan legislatif - Keterbatasan modal - Tidak ada jaminan pasar - Belum ada tim pemantau penebangan liar - Belum ada kebijakan Pungutan Hasil Hutan	- Pelatihan, pembinaan, pendampingan kontinyu - Pemberdayaan - Koordinasi dan aktifkan forum komunikasi - Membangun komunikasi - Aturan pemerintah (reward dan punishment) - Dukungan dana pemerintah - Membangun kemitraan - Bentuk tim pemantau penebangan liar
Peluang	
- Optimalisasi pengembangan kawasan untuk air, HHBK dan agroforestry - Penerapan teknologi tepat guna (bibit/benih unggul, pemupukan dan sistem budidaya) - Pengembangan hutan rakyat, usaha tani terpadu (ternak, ikan dan tanaman) - Kerjasama dengan lembaga penelitian	

Rencana aksi kelompok ini tetap menekankan kembali pentingnya pengukuhan kawasan dan penatagunaan hutan dan pengembangan kelembagaan melalui pendampingan.

Rencana Aksi Pemerintah Daerah					
Tujuan Umum: kepastian legalitas PHBM					
Tujuan khusus: percepatan PHBM					
Gagasan Kegiatan	Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan	Waktu			Lembaga Pelaksana
		2014	2015	2016	
Pengukuhan kawasan	Penunjukan kawasan hutan	✓			Baplan, Pemprov dan Pemkab.
	Penataan batas kawasan hutan	✓			
	Pemetaan kawasan		✓		
	Penetapan kawasan			✓	
Fasilitasi proses pembentukan kelembagaan PHBM	Identifikasi pelaku	✓			Pemerintah pusat, pemprov, pemkab, LSM, Pokmas dan Tomas
	Sosialisasi dan koordinasi	✓			
	Pengajuan Badan Hukum	✓			
Penatagunaan lahan hutan	Pembagian zona	✓	✓		Pemprov dan Pemkab
	Sosialisasi			✓	
Pendampingan/ pemberdayaan	Pembentukan tim lintas sektor		✓		Dishut, Bappeda, LSM dan Perhutani
	Perencanaan kegiatan		✓		
	Penyediaan dana kegiatan		✓		
	Monitoring dan evaluation	✓	✓	✓	

Hasil Diskusi Kelompok Akademisi dan Organisasi Internasional

Tantangan dan peluang yang disoroti oleh kelompok peneliti dan akademisi lebih berfokus pada tidak adanya persepsi yang sama dan trust antara stakeholders PHBM. Pada ranah birokrasi, sejarah panjang sentralisasi pada masa lalu belum berubah walaupun sudah ada keputusan politik untuk desentralisasi.

Tantangan
• Persepsi berbeda antara semua stakeholder terhadap kebijakan PHBM • Tidak adakepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dalam kebijakan PHBM • Pengukuhan kawasan hutan belum selesai • Kapasitas semua stakeholder dalam pengelolaan kehutanan masih perlu ditingkatkan • Masih kurangnya budaya berorganisasi di masyarakat • Desentralisasi kebijakan PHBM dari pemerintah pusat tidak ditindaklanjuti Pemda • Penggunaan anggaran untuk pengembangan PHBM tidak meliputi semua kegiatan (KBR dan Bansos) • Nilai ekonomi dari kegiatan PHBM tidak strategis dibandingkan nilai ekonomi alternatif kegiatan di lahan hutan yang lain (pertambangan, perkebunan sawit dll)

Peluang

- Keterlibatan LSM dalam memberikan informasi tentang kebijakan PHBM khususnya tentang hak-hak masyarakat
- Menyusun aturan/perjanjian yang legal antara pemerintah dan masyarakat
- Pengukuhan tata batas kawasan hutan harus diselesaikan
- Pelatihan/pengembangan kapasitas harus ditingkatkan
- Memaksimalkan fungsi desentralisasi
- Hasil dari PHBM justru dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat lokal/daerah tersebut di luar ketentuan bagi hasil
- Keputusan MK mengenai status kawasan hutan dan pengelolaan hutan adat memberi peluang pengembangan PHBM

Sesuai dengan fungsinya, rencana aksi yang disusun kelompok ini terdiri atas sejumlah agenda penelitian untuk menilai kebijakan pemerintah, teknis silvikultur pada program PHBM yang sudah berlangsung maupun aspek sosial dan ekonominya.

Rencana Aksi Akademisi dan Organisasi Internasional

Tujuan Umum: pemberdayaan

Tujuan khusus: pembangunan kapasitas para pihak dalam mendukung implementasi kebijakan PHBM

Gagasan Kegiatan	Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan	Waktu			Lembaga Pelaksana
		2014	2015	2016	
Penelitian tentang informasi dan kebijakan	Membangun jaringan dan agenda penelitian PHBM	✓			RECOFTC
	Penelitian teknik silvikultur untuk skala kecil	✓			ICRAF/Litbang/UNHAS
Kajian sosial ekonomi	Identifikasi lokasi PHBM yang sudah berjalan	✓			CIFOR (ASFCC), Litbang, UNHAS, LSM dan Masyarakat
	Sosialisasi dan Identifikasi partner	✓			
	Penelitian	✓	✓	✓	
	Terjemahan dan diseminasi hasil penelitian ke bacaan praktis		✓	✓	
Kajian kebijakan	Identifikasi kebijakan	✓	✓		CIFOR (ASFCC)
	<i>Desktop one word</i>		✓	✓	
Penelitian kebutuhan informasi	Identifikasi kebutuhan informasi		✓		CIFOR (ASFCC)
	<i>Desktop one word</i>		✓		

Seruan Peserta Forum

Sejalan dengan suasana tahun politik berkaitan dengan pemilihan umum legislatif dan presiden, peserta Forum Nasional juga menghasilkan rumusan seruan kepada anggota DPR dan Presiden terpilih. Seruan ini dianggap penting mengingat prioritas pembangunan kehutanan adalah pilihan politik yang akan sangat ditentukan oleh lembaga legislatif dan presiden sebagai pimpinan eksekutif tertinggi.

Peserta forum nasional mendorong DPR dan Presiden terpilih untuk:

1. Menyelesaikan pengukuhan tata batas kawasan hutan di Indonesia untuk memperjelas status kawasan hutan dan penyelesaian konflik sosial
2. Mengarusutamakan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di dalam pengelolaan hutan di Indonesia
3. Mengalokasikan sekurang-kurangnya 30 persen kawasan hutan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan
4. Menyederhanakan Sistem Pemberian Hak Kelola Hutan Berbasis Masyarakat
5. Mengalokasikan anggaran yang cukup dan tepat bagi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan didukung dengan SDM yang memadai
6. Melibatkan berbagai sektor (multi sektor) yang relevan dalam upaya Pengembangan Hutan Berbasis Masyarakat



KESIMPULAN

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Indonesia sudah meniti perjalanan yang cukup panjang, dimulai sejak tahun 1960an. Namun demikian, hingga saat ini program tersebut belum menjadi arus utama pembangunan kehutanan di Indonesia. Di tingkat perencanaan nasional, hanya 5 persen dari kawasan hutan negara ini dialokasikan untuk rakyat, sementara alokasi untuk korporasi mencapai 39 persen dari total luas efektif kawasan hutan. Ditingkat operasional, dari target pembangunan PHBM 2010-2015 seluas 2.500.000 hektar, yang terealisasi baru sebesar 546.246 hektar atau 21 persen sampai dengan April 2014. Dari realisasi tersebut, tingkat keberhasilannya juga masih bervariasi.

Diversitas geografis wilayah dan kompleksitas permasalahan sosial dan politik negeri ini menyebabkan kerangka hukum dan kebijakan yang dikembangkan selama ini belum sepenuhnya terealisasi. Belum seluruh kawasan hutan Indonesia selesai dikukuhkan tata batasnya. Belum ada status hukum yang kuat bagi masyarakat untuk mengelola, memanen dan memanfaatkan hasil hutan terutama kayu. Proses perijinan untuk memperoleh hak kelola masih terlalu panjang yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Titik-titik lemah pelayanan birokrasi terletak pada tingkat provinsi dan kabupaten yang belum siap memasuki era desentralisasi. Pemerintah daerah tingkat propinsi dan kabupaten yang seharusnya aktif mendukung pengembangan PHBM untuk kesejahteraan masyarakatnya belum melihat potensi tersebut. Rencana kelola dan rencana tahunan pengelolaan hutan yang rumit bagi masyarakat juga memperpanjang daftar tantangan yang perlu diatasi bersama.

Mengatasi tantangan tersebut Forum Nasional yang diselenggarakan selama dua hari ini telah mengawali dialog dan membuka mata untuk saling bekerjasama lintas sektoral membangun sinergi. Pemerintah pusat dan daerah, LSM nasional maupun internasional, lembaga akademisi, sektor swasta dan kelompok masyarakat membangun Rencana Aksi Bersama untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan membangun kapasitas para pihak yang terkait dengan pengembangan PHBM. Rencana Aksi bersama tersebut merupakan awal bagi perubahan ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil evaluasi para peserta yang hadir hingga acara selesai, Forum Nasional ini mempunyai tujuan yang jelas dan seluruh proses telah mendukung pencapaian tujuan forum seperti yang direncanakan. Seluruh presentasi dan proses diskusi yang berlangsung selama forum dinilai sesuai dan mendukung pencapaian tujuan.









Misi RECOFTC adalah meningkatkan kapasitas demi pemenuhan hak, tata pemerintahan yang lebih baik, dan pembagian manfaat dengan asas keadilan bagi masyarakat lokal dalam lanskap hutan di kawasan Asia dan Pasifik.

RECOFTC memegang peranan unik dan penting di dunia kehutanan. RECOFTC merupakan satu-satunya organisasi non-profit yang memiliki spesialisasi dalam peningkatan kapasitas kehutanan masyarakat. RECOFTC terlibat dalam jejaring strategis dan kemitraan bersama pemerintah, organisasi non-pemerintah, swasta, institusi riset dan pendidikan, serta masyarakat lokal di Asia Pasifik. Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di kancah internasional dan mengedepankan pendekatan dinamis dalam peningkatan kapasitas- diantaranya melalui riset, demonstrasi area, serta pelatihan, RECOFTC menawarkan solusi inovatif bagi masyarakat dan hutan.

RECOFTC – The Center for People and Forests
P.O. Box 1111
Kasetsart Post Office
Bangkok 10903, Thailand
Tel (66-2) 940-5700
Fax (66-2) 561-4880
info@recoftc.org
www.recoftc.org



Dicetak di atas kertas daur ulang



Norad



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC



SWEDEN